

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Energi atau bahan bakar selalu memiliki peranan yang sangat besar dalam perkembangan ekonomi dan teknologi suatu peradaban. Bahan bakar di dalam Manual Statistik Energi didefinisikan sebagai suatu zat yang dibakar untuk menghasilkan panas atau tenaga. Panas ini kemudian diperoleh dari proses pembakaran dimana karbon dan hidrogen pada bahan bakar bereaksi dengan oksigen dan melepaskan panas. Bahan bakar yang diproses baik dengan cara mekanis ataupun listrik kemudian menghasilkan energi. Istilah energi sendiri, di dalam statistik energi merujuk hanya pada panas dan tenaga, tetapi secara bebas juga digunakan oleh banyak pihak untuk mencakup bahan bakar (Statistik Manual 2015, hlm. 1). Kesadaran akan pentingnya pasokan energi telah sampai pada tingkat yang tinggi dalam agenda politik global. Hal tersebut diakibatkan karena munculnya fenomena bahwa pertumbuhan kebutuhan terhadap pasokan energi khususnya, minyak bumi, tidak lagi seimbang dengan pasokan yang mampu diproduksi. Perkembangan ini, mengakibatkan terjadi perubahan drastis dalam dunia hubungan internasional dalam beberapa dasawarsa terakhir. Negara - negara barat yang merupakan negara industri maju dengan konsumsi energi yang besar mulai memasukkan agenda keamanan pasokan energi dalam perumusan kebijakan politik luar negeri mereka.

Wilayah Asia Tengah, terutama di sekitar Laut Kaspia telah lama dikenal sebagai wilayah yang kaya akan sumber energi fosil. Potensi yang sedemikian besar ini kemudian menjelaskan betapa pentingnya kawasan Asia Tengah terhadap pasokan minyak dan gas dunia. Bahkan hingga saat ini, pasca runtuhnya Uni Soviet potensi ini menjadi rebutan dari negara-negara barat yang mencoba mengamankan pasokan energi untuk negaranya. Kazakhstan yang termasuk wilayah Asia Tengah memiliki potensi energi yang tergolong besar, dengan ekspor minyak bumi merupakan peringkat ke-18 di dunia (The World Fact Book 2014, hlm 1). Ladang minyak di Tengiz merupakan salah satu proyek ladang minyak

terbesar di Kazakshtan. Blok Tengiz mampu memproduksi hingga 22 juta ton minyak setahun. Blok yg mulai beroperasi sejak tahun 1993 ini dikelola oleh setidaknya empat perusahaan dan tiga diantaranya perusahaan swasta Exxon Mobile, ChevronTexaco, dan Lukarko yang jika digabungkan kepemilikan sahamnya mencapai 80% (Ariel Cohen 2006, hlm 2). Namun, hal yang perlu menjadi perhatian adalah kebijakan pemerintah Kazakhstan terhadap investasi asing. Pemerintah Kazakhstan menetapkan kebijakan yang memungkinkan penguasaan swasta terhadap kekayaan negara di bidang energi. Sebagai contoh, adalah ladang minyak di wilayah Tengiz. Ladang minyak di Tengiz merupakan salah satu proyek ladang minyak terbesar di Kazakshtan. Blok Tengiz mampu memproduksi hingga 22 juta ton minyak setahun. Blok yg mulai beroperasi sejak tahun 1993 ini dikelola oleh setidaknya empat perusahaan dan tiga diantaranya perusahaan swasta Exxon Mobile, ChevronTexaco, dan Lukarko yang jika digabungkan kepemilikan sahamnya mencapai 80% (Ariel Cohen 2006, hlm 13).

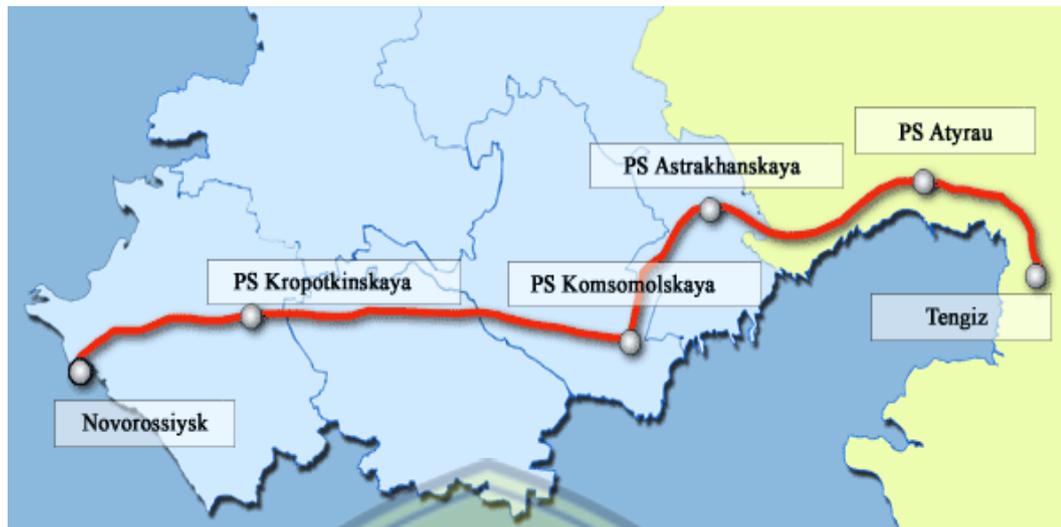
Industri minyak dan gas dari Kazakhstan memainkan peran penting dalam gas di wilayah tersebut tidak akan mungkin tanpa investasi langsung asing atau *Foreign Development Investment* (FDI). Volume tahunan FDI telah meningkat dari tahun ke tahun sejak tahun 1998 dan pangsa investasi di industri minyak dan gas di total volume FDI tetap tinggi. Menurut BP Statistical Review of World Energy Juni 2013, Kazakhstan memiliki cadangan diperkirakan mencapai 30,0 miliar barel (3,9 miliar ton) minyak dan cadangan terbukti gas alam 45,7 triliun kaki kubik (1,3 triliun meter kubik), yang mewakili 1,8% dan 0,7 % dari total cadangan dunia (Kazakhstan Oil Gas 2014, hlm. 2). Rusia dan Kazakhtan berasal dari negara yang sama, Uni Soviet. Namun, runtuhnya Uni Soviet menjadikan negara-negara yang di bawah kekuasaannya berusaha melepaskan diri dan menyatakan kemerdekaan masing-masing. Rusia, merupakan negara pecahan Uni Soviet terbesar, dan menguasai lebih dari 50% aset dari Uni Soviet. Sedangkan Kazakhtan merupakan negara pecahan Uni Soviet dengan wilayah terluas di Kawasan Asia Tengah. Hal tersebut menjadi alasan yang rasional apabila masing-masing negara berupaya untuk mengamankan kepentingan nasionalnya masing-masing. Kerjasama antara Rusia dan Kazakhstan saling memiliki keuntungan dan ketergantungan terhadap Kazakhstan dalam segi minyak

dan gas untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan wilayahnya dan Kazakhstan sendiri diuntungkan dalam segi pembangunan dan protectionisme sumber daya alam agar tidak masuknya ikut campur negara-negara barat.

Rusia menganggap Kazakhstan penting bagi kepentingan nasional Rusia dalam hal energi minyak karena Rusia merupakan pengguna energi minyak yang besar dan perlu menanamkan ideologinya terhadap Kazakhstan demi menjaga kestabilan pasokan energinya karena kesadaran akan pentingnya pasokan energi telah sampai pada tingkat yang tinggi dalam agenda politik global. Hal tersebut diakibatkan oleh munculnya fenomena bahwa pertumbuhan kebutuhan terhadap pasokan energi khususnya, minyak bumi, tidak lagi seimbang dengan pasokan yang mampu diproduksi. Perkembangan ini, mengakibatkan terjadi perubahan drastis dalam dunia internasional dalam beberapa tahun terakhir. Negara-negara barat yang merupakan negara industri maju dengan konsumsi energi yang besar mulai memasukkan agenda keamanan pasokan energi dalam perumusan kebijakan politik luar negeri mereka, Oleh karena itu Rusia merasa terancam atas negara-negara barat yang ingin masuk atau ingin ikut campur atas minyak yang ada di Kazakhstan dikarenakan alasan pasokan energi dalam bentuk minyak dan gas. Upaya yang dilakukan Rusia di bawah kepemimpinan Presiden Vladimir Putin untuk menjaga hubungan tersebut adalah dengan memanfaatkan peninggalan dari Uni Soviet. Isu transportasi dan infrastruktur dalam bidang energi menjadi *tools* dari Rusia untuk menjaga kontrolnya di Kawasan Asia Tengah terutama dalam bidang energi.

CPC atau *Caspian Pipeline Consortium* adalah pipa yang membentang di wilayah Kazakhstan dan Rusia. Pipa ini bermula di wilayah Kazakhstan dan berakhir di kota pelabuhan *Novorossysk* (wilayah Kedaulatan Rusia) di tepi Laut Hitam. Di Kota *Novorossysk* kemudian minyak bumi dikapalkan dan siap untuk disalurkan ke negara konsumen. CPC adalah proyek transportasi minyak internasional terbesar dengan partisipasi Rusia, Kazakhstan dan perusahaan produsen terkemuka di dunia, yang didirikan untuk pembangunan dan pengoperasian pipa minyak batang lebih dari 1.500 km panjangnya. Sistem pipa CPC yaitu dengan mengumpulkan minyak mentah dari ladang minyak besar di Kazakhstan bagian barat / Tengiz (About Caspian Pipeline Consortium, 2014, hlm

1) peta pipa jalur Caspian Pipeline Consortium adalah sebagai berikut:



Sumber : Ariel Cohen. Kazakhstan: Energy Cooperation with Russia, Oil, Gas, and Beyond. London: Global Market Briefing, hlm 14.

Gambar 1 Peta Jalur CPC dari Kazakhtan ke Rusia

Ketiadaan pelabuhan dan posisi geografis negara menyebabkan Kazakhstan tidak dapat mengeksport minyak bumi tanpa melalui wilayah kedaulatan negara lain. CPC kemudian menjadi satu-satunya akses keluar minyak bumi dari Kazakhstan dengan kapasitas distribusi mencapai 67 juta ton minyak bumi per tahun. Sejak tahun 1980-an, Chevron telah memulai kerjasama eksplorasi dan produksi minyak di Blok Tengiz kepada Uni Soviet. Minyak tersebut kemudian dibawa dan dikapalkan di kota pelabuhan di tepi Laut Kaspia. Disintegrasi Uni Soviet menjadi negara-negara independen di Asia Tengah, menyebabkan terjadi permasalahan di sisi transportasi minyak bumi dan gas alam. Minyak yang dihasilkan di Blok Tengiz (termasuk daerah teritorial Kazakhstan) harus melalui wilayah Kedaulatan Rusia agar bisa di pasarkan ke dunia internasional.

Pada tanggal 13 Oktober 2001, CPC pertama kali beroperasi untuk menyalurkan minyak dari blok Tengiz menuju Pelabuhan Laut di dekat kota *Novorossiysk* di tepi Laut kaspia. Hal ini menandai dimulainya proses pengapalan minyak bumi dari Kazakhstan menuju pasar internasional. Dalam meningkatkan kerja sama dan kualitas minyak bumi, didirikan fasilitas serta lembaga yang akan mengontrol dan menjaga kualitas minyak bumi yang melewati CPC. Pada 13

September 2002, berdirilah “*Oil Quality Bank*”. Bank ini menunjukkan komitmen CPC untuk menerapkan sistem ekonomi bebas yang akan menjamin kebebasan setiap pihak untuk membeli minyak melalui CPC dan menjaga agar pihak pengelola CPC senantiasa mendapatkan keuntungan. Kemajuan berikutnya didapatkan pada tahun 2003, ditandai dengan dikeluarkannya pernyataan oleh *The State Acceptance Commission* bahwa CPC telah berhasil melalui uji kelayakan. Sehingga CPC dianggap telah memenuhi standar keamanan baik dari segi teknisnya ataupun dampaknya terhadap lingkungan. Hingga kini, CPC tetap menjadi jalur ekspor utama minyak bumi dari Kazakhstan (Ahmad Gilang 2013, hlm. 66).

CPC atau (*Caspian Pipeline Consortium*) merupakan contoh penggunaan energi sebagai instrumen politik luar negeri Rusia terhadap Kazakhtan. Melalui CPC, Rusia mampu mengontrol volume ekspor minyak Kazakhtan, dalam tingkatan yang lebih tinggi, Rusia memanfaatkan *CPC* sebagai *tools* untuk menentukan pengambilan kebijakan Pemerintah Kazakhtan dalam hal investasi asing dan kerja sama dengan negara barat. Penggunaan elemen politik energi terutama isu transportasi dan infrastruktur sebagai instrumen Politik Luar Negeri Rusia di Kazakhstan menggambarkan upaya dari Rusia untuk mengubah paradigma Politik Luar Negeri Uni Soviet yang terkenal akan instrumen ideologi dan militer. Politik energi terbukti lebih efisien dibandingkan politik militer. Selain lebih menguntungkan dari segi ekonomi, penggunaan instrumen energi juga jauh lebih impatik dalam memberikan pengaruh kepada pihak lain. Dibandingkan dengan instrumen militer yang akan cenderung menimbulkan protes dari dunia internasional. Oleh karena itu, politik energi digunakan sebagai jalan bagi Rusia untuk mencegah meluasnya pengaruh Amerika Serikat dan Uni Eropa di Kazakhstan. Namun, pada masa kepemimpinan Presiden Vladimir Putin, upaya untuk mengembalikan hegemoni Rusia sebagai negara yang disegani dalam peta politik internasional kembali dimulai. Putin meninggalkan dua instrumen politik luar negeri yang menjadi ciri khas Uni Soviet di era perang dingin, yaitu ideologi dan militer. Dan lebih memilih menggunakan instrumen yang lebih soft, yaitu energi sebagai metode untuk mengembalikan posisi Rusia dalam arena politik Internasional. Selain itu juga untuk mengkonsolidasikan kembali

negara-negara pecahan Uni Soviet yang dari aspek geografi politik menjadi sangat strategis dalam hal keamanan dan pertahanan Rusia.

Rusia dan Kazakhshtan sendiri memiliki ikatan yang sangat kuat. Tidak hanya berangkat dari faktor historis, Kazakhstan sebagai negara merdeka yang independen merupakan negara pecahan Uni Soviet dengan wilayah terluas di kawasan Asia Tengah. Hal tersebut menempatkan Kazakhstan merupakan mitra yang sangat strategis bagi Rusia dalam bidang politik, keamanan, bahkan ekonomi. Potensi energi yang dimiliki Kazakhstan tergolong besar, dengan ekspor minyak bumi merupakan peringkat ke-18 di dunia (The World Fact Book 2014, hlm 1). Hingga saat ini, hubungan tersebut tetap terjaga. Dari 89 wilayah administrasi yang dimiliki Rusia, 72 diantaranya memiliki hubungan ekonomi dengan Kazakhstan. Selain itu, Presiden Kazakhstan yang berkuasa selama 20 tahun Nursultan Nazarbaev, merupakan mantan sekretaris Partai Komunis dan Perdana Menteri Uni Soviet pada tahun 1986 (Ariel Cohen 2006, 2). Sekaligus sebagai sumber ekonomi yang potensial bagi Rusia. Hal tersebut menjadikan politik energi menjadi hal yang penting untuk dikaji sebagai bentuk instrumen dalam politik luar negeri.

Strategi paling efektif bagi Rusia dalam diplomasi internasionalnya adalah dengan terus sekali-sekali mengalah dalam perselisihan bea transit, sambil terus secara implisit (atau eksplisit jika perlu) mengancam Kazakhstan dengan menekankan ketergantungan negeri tersebut padanya. Dengan strategi ini, Rusia mestinya mampu menjamin bahwa porsi besar minyak Kaspia akan terus mengalir lewat teritorinya. Namun, seiring berjalannya waktu, Kazakhstan kemungkinan besar akan berusaha mengurangi ketergantungannya pada Rusia, yang secara historis mencakup seluruh sektor ekonominya, termasuk surat kabar, televisi, pangan, transportasi, dan lain-lain (Kazakhstan 2008, hlm 29). Kini, ekonomi Kazakhstan yang sedang berkembang mulai memproduksi dan menyediakan barang-barang ini sendiri, atau menemukan sumber lain. Pemerintah juga mengambil peran aktif dengan membangun jalur rel baru, memodernisasi jalan-jalan lama dan membangun jalan-jalan baru dalam upaya memudahkan perjalanan dari timur ke barat tanpa melewati Rusia, dengan demikian semakin membantu perkembangan industri dan pertanian Kazakhstan yang independen

(About Kazakhstan 2014, hlm 1).

Begitu situasi ini berkembang, Rusia mungkin terpaksa lebih mengandalkan pemikat (carrot) daripada pemukul (stick). Jika menghadapi naiknya kepercayaan diri Kazakhtan dan Rusia bersikeras menuntut bea transit tinggi, dan terutama jika ia menutup CPC untuk alasan politik, Kazakhstan mungkin semakin ingin mencari rute-rute alternatif untuk mengangkut minyaknya. Jika Rusia lebih fokus pada bea transit, berkebalikan dengan meningkatnya pengaruh geopolitik yang akan timbul bersama pengendalian minyak transit, maka prospek peningkatan kapasitas CPC akan berkurang secara dramatis.

I.2 Rumusan Masalah

Maka Rumusan Masalah yang diangkat terkait dengan Latar Belakang Masalah di atas adalah:

Bagaimana Hubungan Kerjasama Rusia dan Kazakhstan dalam Caspian Pipeline Consortium Periode 2011-2014?

I.3 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kerjasama energi Rusia dan Kazakhstan dalam pipa minyak Caspian atau Caspian Pipeline Consortium (CPC) periode 2011-2014.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara akademis, penelitian ini memberikan suatu informasi dan data di dalam jurusan ilmu hubungan internasional untuk memperkaya wawasan mengenai kerjasama energi Rusia dan Kazakhstan dalam Caspian Pipeline Consortium yang dapat digunakan sebagai salah satu referensi mahasiswa hubungan internasional dalam melengkapi karya tulisnya.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan studi hubungan internasional mengenai hubungan kerjasama Rusia dan Kazakhstan dalam bidang energi khususnya di sekitar laut Kaspia dengan studi kasus Caspian Pipeline

Consortium.

I.5 Tinjauan Pustaka

Sumber daya energi khususnya minyak yang dimiliki Kazakhstan membuat Rusia sangat menjadikannya sebagai sarana kepentingan nasional yang sangat strategis. Selain karena faktor historis yang telah terjalin diantara keduanya menjadikan Rusia lebih mudah untuk memonopoli Kazakhtan. Hanya saja sebagai negara berkembang, Kazakhstan dituntut untuk mencari peluang dimana akan mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu Kazakhstan mengambil kebijakan bebas berinvestasi bagi siapa saja yang ingin mengeksploitasi sumber dayanya karena kurangnya ruang gerak untuk Kazakhstan agar bisa mengeksploitasi sumber dayanya sendiri seperti dilihat dari faktor geografis.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua penelitian dan satu jurnal yang pernah ada untuk dijasikan sebagai sumber referensi yang berkaitan dengan *Kerjasama Energi Rusia dan Kazakhstan dalam Caspian Pipeline Consortium (CPC) Periode 2011-2014* berikut merupakan bebarapa referensi penelitian yang digunakan.

Pertama pada penelitian yang berjudul Hubungan Kerjasama Energi Kazakhstan-Amerika Serikat (1994-2010): Upaya Kazakhstan untuk Keluar dari Monopoli Energi Rusia oleh Arya Ahmad Johari mahasiswa Universitas Rusia Depok pada tahun 2012 menjelaskan bahwa Kazakhstan sebagai negara yang memiliki cadangan minyak terbesar setelah rusia berada di tengah arena *Power Struggle* antara Amerika Serikat dan Rusia. Sebagai negara *landlocked* dan eksportir minyak, Kazakhstan menghadapi tantangan besar untuk berusaha mendistribusikan minyaknya ke daerah Eropa karena kondisi geografisnya yang tidak memungkinkan Kazakhstan mengekportir minyak tanpa melalui negara lain salah satunya yaitu Rusia. Kondisi hubungan Kazakhstan dan Rusia dipengaruhi oleh dinamika internal Rusia untuk membentuk ulang bagaimana perspektif Rusia dalam melihat dunia luar, terutama terhadap hubungannya dengan negara-negara eks-Uni Soviet.

Perspektif Rusia terhadap Kazakhstan dan negara-negara di Asia Tengah belum banyak berybah pada awal runtuknya Uni Soviet. Setelah merdeka,

Kazakhstan dengan seketika menjadi salah satu negara yang disebut sebagai negara *near-abroad* (Blizhneye Zarubezh'ye). Pembentukan Caspian Pipeline Consortium merupakan keberhasilan bagi Kazakhstan untuk membentur alur ekspor minyak yang tidak sepenuhnya berada di bawah monopoli Rusia. Sebelum dibentuknya CPC, pipa minyak Tengiz-Novorossiik sangat bergantung pada kebijakan hukum Rusia. Banyak analisis yang menyatakan bahwa praktek CPC merupakan bentuk revolusioner untuk menggantikan pola praktik yang bersifat otoritarian Soviet dengan mengenalkan model manajemen bisnis versi Barat yang dengan efektif memaksimalkan ekstraksi minyak di kawasan Asia Tengah untuk keluar dari kontrol Moscow. Dalam skripsi ini saya banyak mengambil data mengenai historical dari Rusia dan Kazakhstan itu sendiri dalam berbentuk tulisan yang lebih mudah dipahami selain ini didalam skripsi ini juga membahas tentang Caspian Pipeline Consortium dan bagaimana cara Kazakhstan keluar dari monopoli Rusia sehingga sangat berkaitan dengan skripsi yang akan saya buat tentang bagaimana keamanan energi dari Rusia sendiri agar Kazakhstan tetap berada dalam genggaman Rusia apalagi Rusia memiliki rival terberatnya dalam CPC yaitu Amerika Serikat yang berusaha membantu Kazakhstan untuk keluar dari genggaman Rusia dalam bidang energi (Arya Ahmad Johari 2012, hlm 54).

Kemudian, pada penelitian yang berjudul Politik Energi Rusia di Kawasan Asia Tengah (Studi Kasus : Kerjasama Energi Rusia - Kazakhstan), oleh Ahmad Gilang mahasiswa Universitas Hasanuddin pada 2012-2013 ini dijelaskan mengenai bagaimana politik energi Rusia di Asia Tengah khususnya Kazakhstan sebagai negara terbesar dan pemilik cadangan minyak terbesar di kawasan tersebut. Kazakhstan memiliki nilai yang sangat strategis terhadap kepentingan nasional Rusia. Posisi geografi Kazakhstan yang berbatasan langsung dengan Rusia menjadi salah satu alasan utama bagi Rusia agar menjaga kedekatan dan pengaruhnya terhadap Kazakhstan. Dari bidang ekonomi, Kazakhstan menjadi partner ekonomi yang menguntungkan bagi Rusia. Potensi migas yang besar yang dimiliki Kazakhstan menjadi peluang ekonomi bagi Rusia melalui perusahaan negara di bidang energi seperti Gazprom, Rosneft dan Transneft.

Rusia sebagai sebuah negara mampu menempatkan sumber daya alam di bidang energi sebagai sebuah tools dalam politik luar negeri. Strategi yang

ditempuh Rusia adalah dengan mereklaim aset yang dimiliki oleh negara untuk kemudian dipergunakan sebagai media dalam berinteraksi dengan negara lain. Pemerintah Rusia melakukan sinergi kebijakan sehingga Perusahaan milik Rusia di bidang Energi mendapatkan kemudahan dan keistimewaan dalam berinteraksi dan bekerja sama dengan negara lain.

Proses liberalisasi dan privatisasi yang terkesan dipaksakan dan tergesa-gesa digambarkan dari kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Terutama yang menyangkut komoditas-komoditas utama seperti minyak bumi. Dua kebijakan pemerintah yang menjadi acuan adalah proses privatisasi perusahaan negara dalam pasar saham. Pada bulan September 1991, Kementerian Minyak Bumi dan Energi dikonversi menjadi perusahaan *Go Public* dengan nama *Rosneftegaz (Russian Oil and Gas)*. Kebijakan ini menyebabkan banyak pejabat yang kemudian membeli saham dengan harga murah. Untuk kemudian mendirikan perusahaan eksplorasi dan produksi minyak pribadi dengan harga yang relatif murah.

Kebijakan lain yang dikeluarkan pemerintah Rusia adalah pembagian *voucher* saham perusahaan negara kepada masyarakat Rusia. Kebijakan ini oleh Presiden Boris Yeltsin dianggap sebagai upaya demokratisasi ekonomi. Agar masyarakat Rusia sadar dan memiliki akses terhadap kekayaan negara. Namun, yang kemudian tidak diperhitungkan oleh Pemerintah Rusia adalah masyarakat tidak mengerti kegunaan dan cara mengakses *voucher* tersebut. Hal itu dimanfaatkan oleh para konglomerat yang menawarkan penukaran *voucher* dengan uang. Didorong oleh kondisi ekonomi negara yang krisis dan keterbatasan informasi serta pengetahuan. Masyarakat Rusia banyak yang menjual *voucher* saham tersebut. Seperti yang dilakukan oleh Bank Menatep milik Mikail Khodorkovsky. Dengan *voucher* yang dikumpulkan, Khodorkovsky mampu mendirikan Yukoz (Marshall Goldman, hlm 106).

Terpilihnya Presiden Putin, membawa perubahan besar dalam kebijakan Rusia. Putin melihat kebijakan ekonomi negara yang terlalu liberal dan sangat berorientasi pasar telah menghancurkan negara. Penjualan aset-aset negara dengan harga yang sangat murah kepada para oligarki, dan semakin banyaknya negara-negara pecahan Uni Soviet yang cenderung bergerak ke barat dianggap

sebagai ancaman serius bagi negara Rusia. Presiden Vladimir Putin menggunakan instrumen energi menjadi *tools* dalam upaya mengembalikan status Rusia sebagai negara *superpower*. Vladimir Putin mencanangkan Rusia sebagai negara *superpower* dibidang energi. Dengan melihat kondisi ketergantungan negara-negara di dunia terhadap energi yang semakin besar terutama minyak dan gas bumi. Instrumen energi dalam hal ini minyak dan gas bumi dapat menjadi *tools* Rusia untuk menekan ataupun mempengaruhi negara lain agar Rusia dapat mencapai kepentingan nasionalnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Rusia harus mampu menguasai kembali perusahaan-perusahaan yang memiliki nilai strategis bagi Rusia. Perusahaan yang bergerak disektor eksplorasi, produksi dan distribusi energi dalam hal ini minyak bumi dan gas alam. Rosneft sebagai induk dari perusahaan minyak negara, merupakan perusahaan eksplorasi dan produksi minyak bumi. Sedangkan di sektor distribusi minyak bumi dikendalikan oleh Transneft. Adapun di komoditas gas alam, Gazprom menjadi aktor utama. Gazprom bergerak di bidang eksplorasi, produksi dan distribusi gas alam. Ketiga perusahaan ini adalah kunci utama Rusia jika ingin menguasai sektor migas. Oleh karena itu, dengan memandang politik luar negeri suatu bangsa sebagai cerminan kebutuhan dalam negeri, dibentuklah dua kebijakan yang saling terkait dan berkelanjutan. Kebijakan ini yaitu nasionalisasi perusahaan di bidang energi, dan pemanfaatan jalur distribusi energi (Ahmad Gilang 2013, hlm 74).

Selanjutnya, pada jurnal yang berjudul *New Geopolitics of Oil in Central Asia, Russia-Kazakh Relations* karya dari Katerina Ivaschenkava yang dipublikasikan oleh The Political Economy of Energy International School for Humanities and Social Science University of Amsterdam ini membahas tentang kepentingan Rusia di Kazakhstan dalam hal minyak dengan mengutamakan historikal dari kedua negara dan bagaimana kebijakan luar negeri Rusia terhadap Kazakhstan dalam bidang minyak. Pentingnya kepemilikan sumber daya alam secara signifikan telah berkembang dalam dekade terakhir. Oleh karena itu daerah yang berlimpah dengan sumber daya alam menjadi sering bidang minat atau kadang-kadang bahkan soal persaingan antara negara-negara minyak dan gas terbesar mengkonsumsi. Politik global juga mengalami perubahan yang sangat

mendalam. Negara-negara besar tidak lebih tertarik tentang supremasi ideologis. Mereka lebih bercita-cita untuk keunggulan ekonomi dan akses ke beberapa sumber daya alam yang tersisa. Ekspresi geopolitik melemah dan geo-ekonomi menjadi lebih kuat di saat ini konsep hubungan internasional. Oleh karena itu energi memainkan peran penting dalam sistem ekonomi dunia dan politik dunia juga. Selain itu ada aktor baru di kancah internasional.

Kazakhstan memiliki cadangan minyak besar dan penemuan terbaru dari ladang minyak yang diyakini menjadi yang terbesar kelima di dunia, bahkan mengintensifkan persaingan antar pelaku eksternal karena kelangkaan sumber daya alam. Selain itu posisi strategis negara, yang memiliki perbatasan bersama dengan Rusia, memainkan peran penting. Aspek lokasi geografis sumber daya alam dan posisi strategis wilayah akan membawa kita ke masalah geopolitik yang cenderung menyoroti politik global dari perspektif geografi politik. Keterkaitan jurnal ini dengan penelitian saya adalah sebagai data pendukung karena disini dibahas mengenai faktor sejarah dan sumberdaya maupun kebijakan baik Rusia maupun Kazakhstan (Katerina Ivascenkava 2013, hlm 15).

I.6 Kerangka Pemikiran

I.6.1 Kepentingan Nasional

Menurut Hans J.Morgenthau didalam "The Concept of Interest defined in Terms of power", Konsep Kepentingan Nasional (Interest) yang didefinisikan dalam istilah "power" menurut Morgenthau berada diantara nalar, akal atau "reason" yang berusaha untuk memahami politik internasional dengan fakta-fakta yang harus dimengerti dan dipahami. Dengan kata lain, power merupakan instrumen penting untuk mencapai kepentingan nasional (Aleksius Jemandu 2008, hlm 67).

Konsep kepentingan nasional juga mempunyai indikasi dimana negara atau state berperan sebagai aktor utama di dalam formulasi politik yang merdeka berdaulat. Selanjutnya didalam mekanisme interaksinya masing-masing negara atau aktor berupaya untuk mengejar kepentingan nasionalnya. Kepentingan inilah yang akhirnya diformulasikan ke dalam konsep 'power' kepentingan 'interest' didefinisikan ke alam terminologi power (Antonius Sitepu, hlm 56).

Pada dasarnya kepentingan nasional adalah hal yang bersifat abstrak, tetapi sarana yang dilaluinya adalah sesuatu yang nyata. Konsep kunci yang dipergunakan pembuat kebijakan dalam memakai pertimbangan nilai pada realitas tindakan politik adalah kepentingan nasional. Pernyataan tersebut masih kabur dan sukar dijabarkan. Ia dapat dianggap bersifat umum, jangka panjang, yang menjadi tujuan abadi dari negara, bangsa, dan pemerintah, serta mencakup segala gagasan mengenai 'kebaikan'. Dalam prakteknya ia disintesis dan diberi bentuk oleh para pembuat kebijakan sendiri (Dahlan Nasution, hlm 6).

I.6.2 Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional lainnya. Spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara memang bertujuan untuk mencapai keamanan nasional suatu bangsa pada waktu itu ditentukan oleh siapa yang berkuasa pada waktu itu. Untuk memenuhi kepentingan nasional negara tersebut, negara maupun aktor dari negara tersebut melakukan berbagai macam kerjasama diantaranya kerjasama bilateral, triateral, regional, multilateral.

Menurut Rosenau, pengertian kebijakan luar negeri yaitu upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya. Kebijakan luar negeri menurutnya ditujukan untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara. Selanjutnya menurut Rosenau dalam menjalankan kebijakan luar negeri setiap negara memiliki tujuan tertentu. Tujuan dari kebijakan luar negeri sebenarnya adalah fungsi dari proses dimana tujuan tersebut disusun. Tujuan itu sendiri di pengaruhi oleh sasaran yang dilihat pada masa lalu dan aspirasi masyarakat di masa yang akan datang. Tujuan kebijakan luar negeri dibedakan antara tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Pada dasarnya tujuan jangka panjang kebijakan luar negeri adalah untuk mencapai perdamaian, keamanan, kesejahteraan dan kekuasaan. (T.May Rudi 2005, hlm 28). Sementara menurut

Holsti, lingkup kebijakan luar negeri meliputi semua tindakan serta aktivitas negara terhadap lingkungan eksternalnya dalam upaya memperoleh keuntungan dari lingkungan tersebut, serta hirau akan berbagi kondisi internal yang menopang formulasi tindakan tersebut (Anak Agung Banyu Perwita 2011, hlm 18) Konsep ini akan dipakai sebagai acuan dalam pengambilan keputusan baik Rusia dan Kazakhstan dalam kerjasama diantara keduanya yang akan dibahas dalam BAB II.

I.6.3 Kerjasama Internasional

Dalam hubungan internasional dikenal apa yang dinamakan kerjasama internasional. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif.

Dengan kata lain kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan. Hal tersebut memunculkan kepentingan yang beraneka ragam sehingga mengakibatkan berbagai masalah sosial. Untuk mencari solusi atas berbagai masalah tersebut maka beberapa negara membentuk suatu kerjasama internasional (Banyu Perwita 2011, hlm 33).

Telah menjadi bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bahwa setiap bangsa-bangsa di dunia ini akan melakukan interaksi antar-bangsa yang mana terselenggaranya suatu hubungan internasional baik melalui berbagai kriteria seperti terselenggaranya suatu hubungan yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kusumohamidjojo tentang hubungan bilateral yakni suatu bentuk kerjasama diantara negara-negara yang berdekatan secara geografis ataupun yang jauh diseberang lautan dengan sasaran utama untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kesamaan politik kebudayaan dan struktur ekonomi.

(Kusumohamidjojo 1987, hlm 3)

Terselenggaranya hubungan bilateral juga tidak terlepas dari tercapainya beberapa kesepakatan antara dua negara yang melakukan hubungan yang mana mereka mengabdikan pada kepentingan nasionalnya dalam usaha untuk menyelenggarakan politik luar negerinya masing-masing. Dengan tujuan nasional yang ingin dicapai suatu bangsa dapat terlihat dari kepentingan nasional yang dirumuskan oleh elit suatu negara. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Plano dan Olton bahwa Hubungan kerjasama yang terjadi antara dua negara didunia ini pada dasarnya tidak terlepas dari kepentingan nasional masing-masing negara. Kepentingan nasional merupakan unsure yang sangat vital yang mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi. (Plano 1990, hlm 7) Selanjutnya, dalam kamus politik internasional, Didi Krisna mendefinisikan konsep tentang hubungan bilateral adalah sebagai berikut, bahwa "hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua belah pihak (dua negara)". (Krisna 1993, hlm 18)

Hubungan bilateral yang dimaksud adalah kerjasama dibidang ideology, politik, ekonomi, hukum, keamanan. Namun dalam penulisan ini yang akan dibahas adalah hubungan bilateral yang difokuskan pada kerjasama ekonomi. Adapun menurut Holsty dan Azhary tentang Variabel-Variabel yang harus diperhitungkan dalam kerjasama bilateral adalah:

- a. Kualitas dan kuantitas kapabilitas yang dimiliki suatu negara.
- b. Keterampilan mengerahkan kapabilitas tersebut untuk mendukung berbagai tujuan.
- c. Kredibilitas ancaman serta gangguan.
- d. Derajat kebutuhan dan ketergantungan.
- e. Responsivitas di kalangan pembuat keputusan. (Holsty 1988, hlm 22).

Hubungan bilateral mengandung dua unsur pemaknaan, yakni: konflik dan kerjasama. Antara keduanya memiliki arti yang saling bergantung tergantung dari konsep apa yang ditawarkan antara kedua negara menurut motivasi-motivasi internal dan opini yang melingkupinya. Setiap terbinanya hubungan bilateral yang

diupayakan oleh suatu negara dengan negara lain dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan diantara keduanya. Seperti yang dikemukakan oleh Coplin bahwa Melalui kerjasama internasional, negara-negara berusaha memecahkan masalah sosial, ekonomi dan politik. Tipe yang pertama menyangkut kondisi-kondisi di lingkungan internasional yang apabila tidak diatur akan mengancam negara-negara yang terlibat. Tipe kedua mencakup keadaan sosial, ekonomi dan politik domestik tertentu yang dianggap membawa konsekuensi luas terhadap system internasional sehingga dipersepsikan sebagai masalah internasional bersama. (Coplin, 1992, 263)

Selanjutnya dalam konsepsi ideal pengambilan keputusan politik luar negeri senantiasa memperhatikan nilai-nilai ideal, yaitu membentuk system yang lebih menawarkan pola dan tata cara hidup politik dalam arti yang seluas-luasnya, bebas dari kekurangan materil serta bebas untuk mengembangkan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan (Sudarsono 1988, hlm 607). Dalam kaitannya dengan rationality and foreign policy, bahwa perwujudan atau penentu sasaran, obyek atau mitra hubungan merupakan pillihan yang rasional dengan memperhitungkan sirkumstansi internasional dan kondisi domestik demi meminimalisasi kerugian politik serta mempertahankan posisi politik dipentas internasional. Oleh karena itu hal ini sangat penting untuk diperhatikan dari efisiensi dan tujuan yang ingin dicapai (Viorti 1987, hlm 527). Adapun sisi lain yang dapat ditimbulkan dari adanya hubungan bilateral adalah bias jadi mengandung makna konflik dan kerjasama. Konsep ini akan dipakai pada analisis di BAB III sebagai acuan utama bagi Rusia untuk menjaga stabilitas pasokan minyaknya dengan cara terus melakukan kerjasama.

I.6.4 Konsep Keamanan Energi

Energi merupakan sumber yang dibutuhkan bagi setiap manusia. Energy diperlukan di setiap level unit, baik dari level individu, hingga level global pun perlu energy. Dari zaman primitive pun, energy dicari oleh para manusia untuk mempertahankan hidup. Semakin kompleks dan produktif suatu masyarakat, semakin besar kebutuhan energy yang diperlukan, tanpa suplai energy yang memadai, masyarakat tidak dapat menghasilkan produk industry yang besar, sehingga tidak dapat menyediakan standar hidup yang baik, dan tidak dapat

membuat pertahanan yang baik untuk memperkuat power suatu Negara (Paul Wiliam 2008, hlm 48). Kebutuhan energy global semakin lama semakin meningkat karena semakin tingginya tingkat kebutuhan dan juga persaingan. Kebutuhan energy yang dibawa dalam perjalanan perdagangan juga dapat memicu ancaman seperti terorisme, pembajakan, dan lainnya sehingga menjadi tantangan tersendiri (Paul Wiliam 2008, hlm 485)

Secara umum terminologi keamanan energi mengalami perkembangan dan dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, keamanan energi adalah ketersediaan energi dalam kuantitas yang cukup dan harga yang terjangkau. Pemahaman ini berkembang di periode 1970an hingga 2000an. Kedua, keamanan energi diterjemahkan dengan lebih luas, yaitu keberlanjutan (sustainability) dari energi dan kemudahan akses dalam memanfaatkan sumber energi. Aspek lingkungan juga menjadi perhatian sehingga kebijakan mulai bergerak untuk tidak hanya mencari cadangan baru dari energi konvensional, tetapi juga melakukan inovasi dalam pemanfaatan energi bersih dan terbarukan (LIPI 2010, hlm 24). Dalam menjaga keamanan energi terdapat dimensi-dimensi yang diperhatikan selain kuantitas suplai yang cukup dan harga yang terjangkau. Dimensi-dimensi ini berkembang seiring dengan berkembangnya dinamika dan tantangan yang ada di dunia. Menurut Daniel Yergin dalam narasi di salah satu bukunya, *The Quest*, dimensi-dimensi yang berkembang dari keamanan energi adalah keamanan fisik, akses ke sumber energi, sistem, dan iklim investasi (Daniel Yergi 2010, hlm 1).

Keamanan energi adalah istilah yang mengacu pada ketersediaan sumber daya untuk konsumsi energi dalam jangka waktu tertentu (jangka pendek atau jangka panjang untuk menjamin tersedianya energi). Keamanan energi adalah salah satu prasyarat utama pertumbuhan ekonomi masa depan. Ekonomi dunia secara tradisional bergantung pada bahan bakar fosil (minyak, batubara dan gas alam). Hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa pasokan yang cukup dari bahan bakar fosil masih merupakan satu-satunya hal yang menjamin keamanan energi masa depan. Transisi ke energi terbarukan bisa mengubah hal ini, tapi semua perkiraan saat ini menyebutkan bahwa perekonomian dunia akan terus bergantung pada bahan bakar fosil setidaknya sampai akhir abad ini. Dengan skenario ini, bahan bakar fosil akan terus menentukan nasib masa depan keamanan energi global.

Peran energi dalam meningkatkan keamanan energi harus terus ditingkatkan, karena semakin banyak energi yang berasal dari sumber energi terbarukan domestik berarti mengurangi impor bahan bakar dari pihak asing yang mahal. Porsi sumber energi dalam energi di suatu negara juga berarti mengurangi ketergantungan energi. Kemandirian dan keamanan energi adalah dua hal yang berkaitan erat, pada dasarnya dalam banyak kasus meningkatnya keamanan energi berarti ada peningkatan kemandirian energi (ketergantungan yang lebih rendah pada impor bahan bakar asing yang mahal).

Ada banyak ancaman bagi keamanan energi, misalnya gejolak politik di negara-negara kaya minyak, seperti yang akan saya bahas pada skripsi saya yaitu tentang Rusia yang berupaya mengamankan energinya dalam Caspian Pipeline Consortium di Kazakhstan sebagai negara mitra dalam hal energi. Keamanan energi juga tidak hanya mengacu pada jumlah sumber daya energi yang tersedia di negara tertentu tetapi juga berupa keamanan pasokan energi (jaringan distribusi yang memadai)

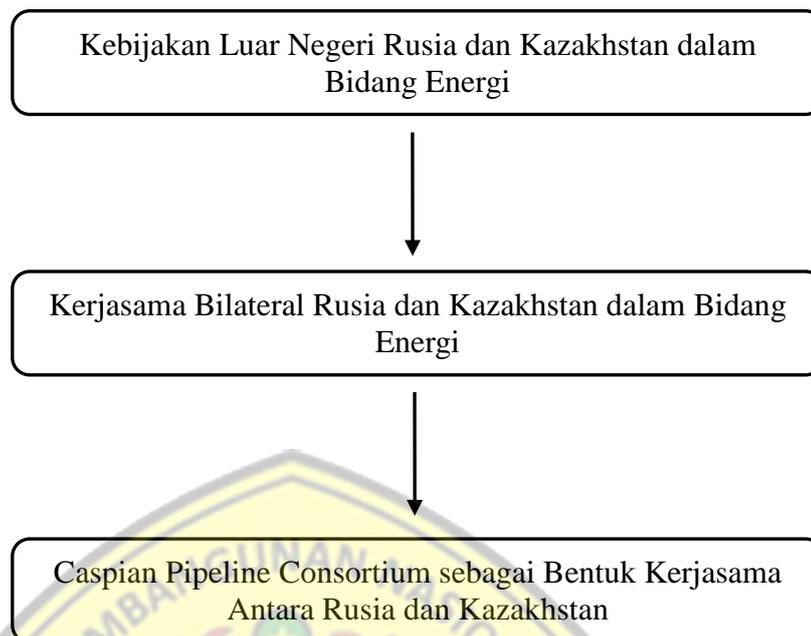
I.6.5 Konsep Caspian Pipeline Consortium

Caspian Pipeline Consortium (CPC) merupakan perusahaan multinasional yang berdiri sejak runtuhnya Uni Soviet. CPC ini berbentuk pipa yang membentang antara kawasan Rusia dan Kazakhstan. Pipa ini bermula di wilayah Kazakhstan dan berakhir di kota pelabuhan *Novorossysk* (wilayah Kedaulatan Rusia) di tepi Laut Hitam. Di Kota *Novorossysk* kemudian minyak bumi dikapalkan dan siap untuk disalurkan ke negara konsumen. CPC adalah proyek transportasi minyak internasional terbesar dengan partisipasi Rusia, Kazakhstan dan perusahaan produsen terkemuka di dunia, yang didirikan untuk pembangunan dan pengoperasian pipa minyak batang lebih dari 1.500 km panjangnya. Sistem pipa CPC yaitu dengan mengumpulkan minyak mentah dari ladang minyak besar di Kazakhstan bagian barat / Tengiz (About Caspian Pipeline Consortium 2014, hlm 1).

Pada tanggal 17 Juli 1992, Republik Kazakhstan dan Kesultanan Oman menandatangani kesepakatan pembentukan Caspian Pipeline Consortium. Dalam sebulan, Federasi Rusia bergabung dengan pihak perjanjian. Pada tahun 1996,

proyek ini bergabung dengan 8 pemegang saham swasta mewakili kepentingan perusahaan besar dunia produsen minyak dari tujuh negara. Pembangunan infrastruktur pipa dimulai pada tahun 1999. Pembangunan pipa terobosan upacara diadakan di dekat Yuzhnaya Ozereevka pada tanggal 12 Mei 1999. Pipa linefilling dengan minyak dari Tengiz Fields, Kazakhstan, dimulai pada bulan Maret 2001, dan pada tanggal 13 Oktober tahun yang sama CPC memuat tangki pertama di terminal yang terletak dekat Yuzhnaya Ozereevka. Pada tahun 2004, penerimaan dari minyak Rusia dalam sistem CPC mulai di Kropotkin ps, Krasnodar Krai, dan pada pertengahan tahun yang sama CPC mencapai kapasitas desain penuh proyek konstruksi awal, 28,2 MMTA. Pada bulan Desember 2009, para pemegang saham menyetujui rencana memperluas kapasitas pipa batang CPC sampai dengan 67 MMTA, termasuk berbagai masalah organisasi, teknis, keuangan dan komersial. Saat ini, Caspian Pipeline Consortium adalah jalur transportasi minyak paling penting di Caspian yang - Black Sea Region (Chronology About Caspian Pipeline Consortium 2014, hlm 1). Adapun pemilik saham di CPC adalah 24% Russian Federation, 19% JSC National Company "KazMunaiGaz", 15% Chevron Caspian Pipeline Consortium Company, LUKARCO B.V. 12,5, Mobil Caspian Pipeline Company 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited 7,5%, CPC Company 7%, BG Overseas Holding Limited 2%, Eni International (N.A.) N.V. S.ar.l. 2%, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC 1,75%, dan Oryx Caspian Pipeline LLC 1,75% (Shareholders About Caspian Pipeline Consortium 2014, hlm 1).

I.7 Alur Pemikiran



I.8 Asumsi

- a. Caspian Pipeline Consortium dibuat pasca runtuhnya Uni Soviet oleh Rusia dan Kazakhstan sebagai upaya Rusia agar Kazakhstan tidak menyalurkan minyaknya ke negara lain selain Rusia dengan alasan historis sebagai sesama pecahan Uni Soviet sehingga Rusia semakin mudah untuk memonopoli minyak Kazakhstan.
- b. Rusia tidak terlalu menekankan bea transit kepada Kazakhstan karena takut akan perubahan sikap oleh Kazakhstan dan lebih memilih Amerika Serikat untuk menjadi partnernya dalam bidang energi namun saat ini juga terdapat perusahaan asal Amerika Serikat yang bergabung dalam Caspian Pipeline Consortium Project.
- c. Kebijakan luar negeri Kazakhstan yang mengedepankan investasi bebas mendorong Rusia agar memperketat hubungannya dengan Kazakhstan karena bisa mengakibatkan kerugian bagi Rusia bila di Kazakhstan lebih besar pengaruh oleh rivalnya yaitu Amerika Serikat.

I.9 Metodologi Penelitian

Penulisan skripsi ini melihat bagaimana kerjasama energi Rusia dalam Caspian Pipeline Consortium (CPC) di Kazakhstan Periode penelitian ini dimulai pada tahun 2011 dan berakhir pada tahun 2014. Metodologi dalam sebuah penelitian diperlukan dalam melakukan studi dan penelitian. Hal tersebut diperlukan guna menjawab permasalahan yang terjadi.

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu proses penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia (Nana Syaodih 2010, hlm 60). Metode kualitatif juga merupakan metode yang memberikan sebuah penjelasan dari sebuah peristiwa atau fenomena yang hadir di lingkungan sosial sekitar. Teknik analisisnya, yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena dengan fakta-fakta yang hadir. Kemudian memberikan penjelasan secara objektif dengan memuat fakta dan data yang tersedia, menghubungkan antar faktor sebagai unit analisis dan dijabarkan untuk mencapai suatu kesimpulan.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, data primer yaitu melalui studi dokumen-dokumen resmi Rusia dan Kazakhstan. Sedangkan data sekunder yaitu melalui studi dengan buku-buku dan jurnal yang membahas kerjasama bilateral, keamanan energi, Caspian Pipeline Consortium (CPC), artikel-artikel yang berasal dari berbagai jurnal ilmiah, laporan mengenai *project* CPC, surat kabar serta artikel-artikel yang terdapat dalam situs internet.

c. Teknis Analisa Data

Teknik analisa data dilakukan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan studi literatur. Studi literatur merupakan penelusuran literatur yang bersumber dari buku, media, pakar ataupun hasil dari penelitian orang lain yang bertujuan untuk menyusun teori yang

digunakan dalam melakukan penelitian. Kajian toritis yang bertujuan untuk menelusuri dan mencari dasar-dasar yang berkaitan erat dengan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi oprasional (Kajian Pustaka 2012, hlm 1).

1.10 Sistematika Penelitian

Dalam memudahkan penulis untuk memahami alur pemikiran, maka penelitian ini di bagi dalam bagian-bagian yang terdiri dari bab. Sistematika penulisan adalah membagi hasil penelitian ke dalam empat bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran yang terdiri dari kerangka konsep dan kerangka teori, alur pemikiran, asumsi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KEBIJAKAN LUAR NEGERI RUSIA DAN KAZAKHSTAN DALAM BIDANG ENERGI

Dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana kebijakan antara Rusia dan Kazakhstan dalam bidang energi sebagai awal dari terbentuknya kerjasama diantara keduanya.

BAB III KERJASAMA ENERGI RUSIA DAN KAZAKHSTAN DALAM CASPIAN PIPELINE CONSORTIUM

Bab ini akan membahas bagaimana kerjasama energi Rusia dan Kazakhstan dalam Caspian Pipeline Consortium.

BAB IV KESIMPULAN & SARAN

Bab ini akan berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini sebagai bagian akhir dari penelitian yang akan menjawab pertanyaan penelitian dan saran guna masukan terkait permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA